

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2019/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FACHRORI UMAR**
2. Jabatan : **WAKIL GUBERNUR**
3. NHK : **65206**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.380.000.000**

1. Tanah Seluas 758 m2 di BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2985 m2/240 m2 di BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 515 m2 di BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 2985 m2 di BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah Seluas 17590 m2 di BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 1415 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/142 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **300.000.000**

1. MOBIL, NISSAN TERRANO JEEP Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **375.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **50.106.000****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **1.355.330.224****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----**



Sub Total	Rp.	3.460.436.224
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.460.436.224

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.